

**PEMANFAATAN SABDA DALAM INVENTARISASI ASET DAERAH GUNA
MENDUKUNG PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

JURNAL



Oleh

UMMU SALAMAH

11080554090

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

PRODI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2015

PEMANFAATAN SABDA DALAM INVENTARISASI ASET DAERAH GUNA MENDUKUNG PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Ummu Salamah dan Durinda Puspasari

Program Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan dikatakan berhasil apabila telah menyesuaikan kondisi perusahaan dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan penggunaan sistem yang digunakan. Kini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menerapkan SABDA. SABDA merupakan suatu perangkat lunak dalam menangani proses inventarisasi aset daerah. SABDA dimanfaatkan untuk membantu proses inventarisasi aset dan untuk membantu Kabupaten Lamongan dalam penerapan *e-government*. Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bagian aset daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan jumlah 4 orang. Objek penelitian ini adalah pemanfaatan SABDA dalam inventarisasi aset daerah guna mendukung penerapan *e-government*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan SABDA di bagian aset daerah banyak memberikan keuntungan bagi pegawai dalam inventarisasi aset daerah. Hal ini membuktikan bahwa sistem yang digunakan saat ini adalah sistem yang efektif karena mampu menampilkan data secara cepat, lengkap, dan akurat ketika data tersebut dibutuhkan sehingga dapat membantu pekerjaan pegawai untuk selesai dengan tepat waktu dan dapat membantu pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam menerapkan *e-government*.

Kata kunci: SABDA, Inventarisasi, Aset Daerah, *E-Government*.

A company is successful in implementing its activities if it adjusts its condition and system to the development of era. Today, the finance and assets management institution of Lamongan Regency has implemented SABDA. SABDA is a particular software that handles the process of regional assets inventory. SABDA utilized to assist the process of asset inventory and to help Lamongan in the implementation of e-government. The design of this research was descriptive qualitative research and the methods used in collecting the research data were interview, observation, and documentation. The respondents of the research were 4 employees of sub regional assets of the finance and assets management institution in Lamongan. The object of this research was the use of SABDA in regional assets inventory to support the implementation of e-government. The result of the research showed that the use of SABDA in regional assets inventory in regional assets division contributed a number of benefits for the employees. This proves that the currently used system is effective because it displays the data fast, completely, and accurately when they are needed so that the employees can work as efficiently as possible and help the government of Lamongan in implementing e-government.

Keywords: SABDA, Inventory, Regional Assets, *E-Government*.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah begitu pesat, sehingga menempatkan suatu pemerintahan pada kedudukan sejauh mana pemerintahan tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh pemerintahan itu menguasai kedua bidang tersebut di atas. Pemerintahan merupakan salah satu alat yang mengatur

majunya suatu bangsa dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan Iptek, khususnya untuk kepentingan pemerintahan sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah Pembangunan Nasional, yaitu sektor atau bidang iptek. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perlu untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya teknologi yang memadai maka pemerintahan itu mampu menerapkan *e-government* untuk membantu pemerintahan berkomunikasi dengan rakyatnya.

Pemerintahan pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan bangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan serta meletakkan supremasi hukum. Penataan pemerintahan sekarang ini semakin terbuka, dimana nilai-nilai *universal* dibidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari pengamatan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan. *E-Government* menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. *E-Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara langsung sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Menyadari akan besarnya manfaat *e-government*, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan *e-government* dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional, pengembangan *e-government*.

E-Government merupakan kegiatan pemerintahan yang menggunakan media teknologi dan informasi, dalam memberikan informasi dan pelayanan untuk warganya, serta hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. *E-Government* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Keberhasilan suatu pemerintahan salah satunya adalah tergantung bagaimana pemerintahan itu mengelola hal-hal yang penting seperti mengelola aset dan keuangan. Pemerintahan daerah pada tahun 2000 masih banyak yang melakukan pengelolaan aset dengan sistem manual, hal itu memacu banyaknya kesalahan seperti ketelitian dan kesalahan dalam perhitungan aset. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stake holder* lainnya kepada pemerintah untuk pengelolaan aset daerah.

Proses inventarisasi berpengaruh terhadap semua fungsi sistem operasi. Tujuan pengelolaan inventarisasi adalah menyediakan persediaan peralatan kantor dengan jumlah dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan yang seringkali ditemui dalam aktivitas pengelolaan inventarisasi adalah; Item apa saja yang harus disediakan atau disimpan di gudang, dan berapa jumlah persediaan yang harus disediakan, serta kapan waktunya suatu pengadaan harus dilakukan untuk *maintenance and repair operation*. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu program yang disebut dengan SABDA.

Sistem pengelolaan aset daerah biasa disebut dengan Sistem Aplikasi Barang Daerah (SABDA) merupakan sistem yang mengatur dalam proses pengelolaan aset daerah terutama pada bagian penatausahaan. Sistem informasi memegang peranan penting dalam proses pengelolaan aset pemerintah daerah, karena dengan adanya sistem informasi barang daerah pengelolaan aset akan lebih tertata, akuntabel dan transparan. Sistem pengelolaan aset daerah ini diterapkan juga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, karena adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang perbendaharaan negara. SABDA disini adalah suatu sistem dimana didalamnya mengatur tentang pengadaan dan pengkodean barang daerah yang dikelola di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang terletak di Jalan Lamongrejo Kabupaten Lamongan adalah

salah satu badan pemerintahan daerah yang mengelola keuangan daerah serta mengelola aset daerah. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, seperti aset berwujud. Aset berwujud terdiri atas aset bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan, irigasi & jembatan, dan aset tetap lainnya. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan unsur pendukung kepala daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 5 Tahun 2014).

Dalam perkembangan di era modern sekarang banyak timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh pemerintah pusat, namun di tingkat daerah juga masih banyak permasalahan dalam proses pengelolaan aset daerah, seperti yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Lamongan. Banyaknya pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan belum bisa mengoprasikan sistem SIMBADA, Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berinovasi merubah pola sistem pengelolaan yang lama (SIMBADA) dengan menerapkan sebuah Sistem Aplikasi Barang Daerah atau SABDA dalam proses pengelolaan aset daerah terutama pada bagian penatausahaan karena SABDA dianggap lebih mudah dalam

pengaplikasiannya. Sistem informasi memegang peranan penting dalam proses pengelolaan aset pemerintah daerah, karena dengan adanya sistem informasi barang daerah pengelolaan aset akan lebih tertata, akuntabel dan transparan serta dapat mengurangi beban kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa program SABDA masih belum maksimal dalam proses pengelolaan aset daerah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ritta selaku Kepala Sub Bidang Aset dalam wawancara bahwa SABDA masih belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih ada pegawai yang belum bisa dalam proses penginputan datanya. Selain itu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga belum menerapkan sistem online bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja aset yang ada di Kabupaten Lamongan, seperti apa saja aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan dan dimana saja aset daerah tersebut didistribusikan, dalam hal ini dapat menghambat Kabupaten Lamongan dalam menerapkan *e-government*.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui: inventarisasi aset daerah melalui SABDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, Kendala dalam proses inventarisasi aset daerah melalui SABDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, Pemanfaatan SABDA apakah telah mendukung penerapan *e-*

government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Administrasi

Siagian (dalam Aufa, 2014) mendeskripsikan Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan White (dalam Aufa, 2014) menyatakan bahwa Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil.

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan dari beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Barang atau Aset Milik Daerah

Mahmudi (2010) mendefinisikan Barang atau aset milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan

surat-surat berharga lainnya. aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Sistem Aplikasi Barang Daerah (SABDA)

Sistem informasi saat ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan administrasi kantor, karena dengan adanya sistem informasi tersebut dapat menunjang kinerja serta tugas pokok dan fungsi dari kantor pemerintahan. Salah satunya adalah pemerintah daerah dalam proses pengelolaan aset atau barang milik daerah yang menerapkan program Sistem Aplikasi Barang Daerah atau biasa dikenal dengan SABDA. Sistem Aplikasi Barang Daerah ini dibuat setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan no. 6 tahun 2006 tentang perbendaharaan negara yang menimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. SABDA yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah suatu program yang dibuat untuk mengatur proses inventarisasi aset daerah baik itu aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. SABDA adalah suatu sistem pembaruan dari SIMBADA yang dianggap kurang baik dalam pengelolaan aset daerah, oleh karena itu di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menerapkan sistem baru yaitu SABDA dengan harapan dapat membantu dalam inventarisasi aset daerah. Tujuan dari pembuatan SABDA adalah untuk membantu pemerintah khususnya pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan administrasi atau inventarisasi aset daerah supaya lebih efektif dan akuntabel

Inventarisasi Aset Daerah

Sugiama (dalam Destriani, 2014) mendeskripsikan bahwa inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintahan. Seluruh aset perlu diinventarisasi baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri (inventasi), hibah ataupun dari cara yang lainnya. Siregar (dalam Destriani, 2014) menyatakan bahwa inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk luas, lokasi, volume, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kedefikasi atau labeling, pengelompokan dan pembukuan atau administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Berdasarkan beberapa

pengertian inventarisasi aset daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset daerah adalah suatu kegiatan melaksanakan pengaturan, pencatatan aset, menyusun daftar aset yang bersangkutan ke dalam suatudaftar inventaris secara teratur dan mengurusnya menurut ketentuan yang ada.

Tujuan inventarisasi aset daerah menurut Siregar (dalam Destriani, 2013) ada beberapa tujuan, antara lain untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki; untuk menghemat keuangan; sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan; untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang; memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang; memberikan data dan informasi dalam; menentukan keadaan barang (barang yang rusak atau tua) sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya; memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.

E-Government

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. *E-Government* biasa dikenal dengan *e-government*, pemerintah digital, *online* pemerintah atau transformasi. *E-Government* adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan ke-pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi

warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis (Sayu Sriyanti, 2012).

Konsep *e-government* bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif *e-government* perlu untuk diimplementasikan. Sebuah negara memutuskan mengimplementasikan *e-government* karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat. Jika *e-government* sebenarnya adalah suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan objektif bersama dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu visi yang dirancang juga harus mencerminkan visi bersama dari para *stakeholder* yang ada. Karena visi tersebut berasal “dari, oleh, dan untuk” masyarakat atau komunitas dimana *e-government* tersebut diimplementasikan, maka nuansanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Manfaat *e-government* menurut Yakub (2012:133), manfaat dari *e-government* yaitu: pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan; Peningkatan hubungan antara pemerintah.

Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik; Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya; Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien; Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut *e-government* membuat masyarakat semakin mudah mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar; Mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sector usaha industri; Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif untuk subjek penelitian dikenal dengan sebutan informan atau narasumber. Untuk penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bidang Aset, dan Staf Sub Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

Proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan instrumen penelitian yang sudah

dibuat oleh penulis, yakni kisi-kisi wawancara dan juga pedoman observasi. Untuk analisis data digunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data (*Data Reduction*) dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja. Reduksi data perlu dilakukan karena ketika peneliti semakin lama dikancah penelitian akan semakin banyak data atau cacatan lapangan yang peneliti kumpulkan. Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu. Selanjutnya adalah penyajian data (*Display data*) yaitu seluruh data-data di lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisa sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang pemanfaatan SABDA dalam inventarisasi aset daerah guna mendukung penerapan *e-government* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Data yang disajikan berupa diagram tulang ikan atau *fish bone diagram*, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan tindakan apa selanjutnya yang akan dikerjakan. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan sementara dari penelitian ini yang dibuat penulis adalah perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh terhadap pemerintahan saat ini, dengan adanya fasilitas

internet dan adanya teknologi suatu kegiatan inventarisasi aset daerah akan lebih efisien dan akuntabel, salah satunya adalah dengan menggunakan Sistem Aplikasi Barang Daerah dalam inventarisasi aset daerah.

Dalam penelitian ini untuk keabsahan data digunakan triangulasi. Menurut Moleong (2013) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi, sebagai teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Mukhtar (2013) menyatakan bahwa triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian menjelaskan tentang: proses inventarisasi aset daerah melalui SABDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, kendala dalam proses inventarisasi aset daerah melalui SABDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, pemanfaatan SABDA telah mendukung penerapan *e-government* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Aset milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Sistem Aplikasi Barang Daerah yang biasa disebut dengan SABDA adalah suatu program yang memudahkan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengatur suatu proses inventarisasi aset daerah baik itu aset yang bergerak maupun tidak bergerak.

Pemanfaatan SABDA dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini didukung dari penelitian oleh Erizul dan Febri Yuliani (2004) yang menjelaskan bahwa “era globalisasi merupakan suatu fenomena bagi setiap organisasi dalam mempertanggung-jawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan baik pada lingkup organisasi privat maupun organisasi publik yang harus mempertanggung-jawabkan tata kelola keuangan daerah kepada para *stakeholder* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”. Adanya program SABDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan pengelolaan aset daerah akan lebih tertata, akuntabel dan transparan.

Pengaplikasian SABDA dimulai pada tahun 2008 dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sebelum adanya program SABDA, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan Sistem Barang Daerah atau biasa disebut dengan SIMBADA. Program SIMBADA itu sendiri dianggap kurang efisien untuk digunakan dalam pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu pada tahun 2008 Program SABDA diaplikasikan dengan tujuan supaya dalam proses pengelolaan aset daerah menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih akuntabel dan transparan, hal itu disampaikan oleh

keempat narasumber dalam penelitian yaitu Bapak Faries, Bapak Dhika, Ibu Echa, dan Ibu Ritta.

Dalam pengaplikasian SABDA sama seperti pengaplikasian program yang lain, seperti program SAKTI yang menangani proses perencanaan dan penganggaran di Sub Bidang Keuangan, program ARSIP dalam menangani kearsipan. Staf di Sub Bidang Aset ada 6 dan masing-masing komputer Staf Sub Bidang Aset terdapat program SABDA dan tiap komputer serta tiap staf mempunyai akun atau kata sandi tersendiri dalam pengaplikasiannya, hal ini dikarenakan adanya suatu privasi dari masing-masing Staf Sub Bidang Aset.

Pemanfaatan SABDA dalam proses inventarisasi aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mulai tahun 2008. Pengaplikasian SABDA dimulai pada tahun 2008 dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat bidang-bidang yang mempunyai tugas berbeda dan program yang berbeda pula. Dalam proses inventarisasi aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mencakup pendataan dari data pengadaan dan pengkodean aset daerah. Tujuan pemberian kode adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.

Setelah adanya pengadaan dan pengkodean aset daerah, tahap selanjutnya di sub bidang aset adalah proses inventarisasi aset daerah dengan

memanfaatkan program SABDA. Ada beberapa proses inventarisasi yang dapat dikerjakan dengan memanfaatkan program SABDA yaitu proses pemasukan data aset, proses mutasi aset, proses pencarian kembali aset, proses penghapusan aset, dan proses pelaporan aset daerah. Langkah-langkah dalam pemanfaatan SABDA untuk proses inventarisasi antara lain: Dalam proses inventarisasi aset daerah cukup dengan memasukkan kode lokasi dan kode barang, dan secara otomatis akan tercatat dalam program SABDA, Pencatatan aset secara otomatis akan masuk ke dalam menu laporan, Untuk pencetakan laporan dapat dipergunakan sebagai bahan laporan bulanan maupun tahunan.

Dapat diketahui bahwa proses inventarisasi aset daerah dengan memanfaatkan program SABDA sangat berdampak positif pada hasil kerja pegawai baik dalam segi waktu maupun keakuratan laporan sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak dhikaa selaku staf sub bidang aset yang menyatakan bahwa selama menjalankan tugasnya mendapatkan hasil yang akurat dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Penggunaan SABDA dalam inventarisasi aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan ini terdapat beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem sebelumnya, seperti: Memudahkan Staf Bidang Aset dalam pengelolaan aset daerah, Laporan pengelolaan aset daerah lebih tertata rapi; Pengelolaan aset lebih akuntabel; Mempersingkat waktu kerja Staf Bidang Aset; Memudahkan Staf Bidang Aset dalam membuat laporan akhir bulan.

Setelah diaplikasikannya SABDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan ada beberapa dampak yang timbul seperti: Pemanfaatan SABDA lebih efisien, hal ini bisa dilihat dengan adanya laporan mingguan, bulanan maupun tahunan yang tidak pernah mengalami kesalahan dalam proses pelaporan. Selain itu pemanfaatan SABDA lebih efisien dalam hal waktu penginputan data, jika menggunakan program sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama, namun jika menggunakan program SABDA pengelolaan aset daerah bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat tergantung sedikit banyaknya data barang yang harus diinput.

Pengaplikasian SABDA juga masih terdapat kendala yang ditimbulkan seperti SABDA hanya bisa dipalिकासikan jika komputer terhubung dengan wifi atau internet. Jika jaringan internetnya terputus maka proses pengelolaan aset daerah dengan memanfaatkan sistem SABDA akan berhenti saat itu juga, jadi kendala dalam pemanfaatan SABDA untuk pengelolaan aset daerah adalah jika koneksi jaringan internet terputus.

Seperti yang dijelaskan diatas, kendala dalam pengelolaan aset daerah dengan memanfaatkan sistem SABDA adalah jika koneksi internet yang digunakan terputus. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Ritta, Ibu Echa, Bapak Faries, dan Bapak Dhika, yang biasanya menggunakan modem atau menunggu sampai koneksi internetnya kembali tersambung, namun jika koneksi internetnya belum bisa tersambung maka Staf Bidang Aset menggunakan sistem manual dalam proses pengadaan dan pengkodean aset daerah.

Selain untuk membantu proses inventarisasi aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, SABDA juga dimanfaatkan untuk membantu penerapan *e-government* di Kabupaten Lamongan, namun Sistem Aplikasi Barang Daerah belum diterapkan secara maksimal. Sistem Aplikasi Barang Daerah adalah suatu sistem yang sudah menggunakan jaringan internet dalam proses penggunaannya, namun SABDA belum menggunakan sistem *online* dalam menjalankan proses pengadaan dan pengkodean sehingga hanya bisa diakses oleh pihak intern atau sesama badan pemerintah

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan pendapat dari Hartono, dkk (2010) yang menyatakan bahwa *e-government* menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: Pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronik; Pemanfaatan kemajuan

teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah daerah.

E-Government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan *e-government* adalah salah satu caranya. Kabupaten Lamongan adalah salah satu daerah yang menerapkan *e-government*. Pada tahun 2010, Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai Kabupaten terbaik se Jawa Timur dalam penerapan *e-government* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan karena beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelayanan kepada masyarakat sudah banyak yang menggunakan sarana jaringan terkoneksi. Di Kabupaten Lamongan sudah banyak SKPD yang menjalankan administrasi pemerintahannya yang berbasis *e-government*, seperti Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) lewat websitenya yang selalu diupdate dengan berbagai informasi terbaru, hal ini tercantum dalam webside resmi Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan mempunyai 27 lingkup kecamatan, dan 14 diantaranya sudah terjangkau oleh teknologi informasi. Selain itu, hampir seluruh pelayanan administrasi baik

kesehatan maupun kependudukan sudah menerapkan dan berbasis elektronik. Pelayanan di Kabupaten Lamongan sudah berupa sistem online, seperti: Sistem akuntansi keuangan daerah; Layanan perijinan; Layanan kependudukan (pembuatan KTP dan KSK); Layanan aplikasi rumah sakit; Layanan puskesmas mail box; Layanan arsip dan perpustakaan elektronik.

Sistem Aplikasi Barang Daerah adalah salah satu sistem yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menunjang penerapan *e-government* di Kabupaten Lamongan. Namun Sistem Aplikasi Barang Daerah belum diterapkan secara maksimal. Sistem Aplikasi Barang Daerah adalah suatu sistem yang sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi dan menggunakan jaringan internet dalam proses penggunaannya, namun SABDA belum menggunakan sistem online dalam menjalankan proses pengadaan dan pengkodean sehingga hanya bisa diakses oleh pihak intern atau sesama Badan Pemerintahan..

Pemanfaatan SABDA dalam membantu penerapan *e-government* di Kabupaten Lamongan ada beberapa kegiatan, yaitu: SABDA sudah menerapkan sistem *online* untuk sesama bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Seperti interaksi antara sub bidang aset dengan sub bidang anggaran, SABDA adalah suatu program yang berbasis teknologi dan terkoneksi dengan internet, Dalam pelaporan kepada Kepala Badan sudah menggunakan internet, sehingga tidak perlu pencetakan atau pengerjaan dengan menggunakan kertas.

Untuk menyikapi kekurangan dalam SABDA, maa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan sistem online untuk Sistem Aplikasi Barang Daerah (SABDA) dengan tujuan supaya dapat membentuk suatu sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom, masyarakat, dan pelaku bisnis. Selain itu untuk membangun suatu saluran komunikasi dengan masyarakat atau lembaga-lembaga daerah serta menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan daerah. Sistem *online* tersebut akan direalisasikan pada awal tahun 2016, hal ini telah disampaikan oleh Bapak Hery selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi narasumber triangulasi dalam penelitian ini.

Dengan adanya penerapan *e-government* di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan mendapatkan dampak yang positif, seperti: Kabupaten Lamongan dari tahun ketahun sudah ada kemajuan dalam teknologi sehingga pegawai pemerintahan daerah lebih mengetahui perkembangan teknologi. Hasil yang diperoleh antara mengerjakan tugas dengan sistem manual dengan teknologi, lebih tertata jika dikerjakan dengan teknologi, sehingga pemerintahan daerah lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Kabupaten Lamongan dinobatkan menjadi Kabupaten atau Kota yang dapat menerapkan *e-government* terbaik se Jawa Timur dengan Penduduk Sedang. Hal ini bisa

menjunjung nama baik Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses inventarisasi aset daerah dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi Barang Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dianggap sesuai. Proses inventarisasi dengan memanfaatkan SABDA menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Dalam pemanfaatannya juga dianggap efisien dari segi waktu dan hasilnya, sehingga dianggap sangat membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya.

Namun dalam pemanfaatan SABDA, SABDA juga terdapat kekurangannya yaitu dalam pemanfaatannya tidak dapat berjalan dengan baik jika jaringan internet yang digunakan terputus.

Pemanfaatan Sistem Aplikasi Barang Daerah dalam mendukung penerapan *e-government* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan masih belum maksimal karena belum menerapkan sistem online secara luas, namun akan direalisasikan pada awal tahun 2016 jika tidak terdapat suatu kendala. Contoh pemanfaatan SABDA dalam *e-government* seperti sudah menerapkan sistem *online* jarak pendek, berbasis teknologi, menghasilkan hasil yang akurat dengan laporan elektronik.

Saran

Peneliti memberikan saran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, diantaranya adalah: Agar

kualitas, kemampuan, dan wawasan seluruh pegawai Sub Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat meningkat, maka perlu dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan dengan adanya pelatihan pegawai Sub Bidang Aset baik dilaksanakan oleh Kepala Daerah maupun oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk mengembangkan serta memperkuat fungsi dan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; Perlu disediakan Jaringan internet yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk memudahkan pemanfaatan Sistem Aplikasi Barang Daerah (SABDA) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam proses pengadaan dan pengkodean aset daerah jika terjadi gangguan dengan jaringan internet yang lain; E-Government di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan khususnya dengan adanya SABDA harus segera direalisasikan supaya tidak hanya menjadi wacana, sehingga SABDA juga dapat mendukung penerapan *e-government* di Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, Inpres No. 3 Tahun 2003.

Iqlima Azhar, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2013. "Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap

Manajemen Aset". *Jurnal Akuntansi* Vol 2 No. 1 Februari 2013: hal. 15-26.

Jogiyanto, H.M. 2005. *Sistem Teknologi: Pendekatan Terintegrasi: konsep dasar, teknologi, aplikasi, pengembangan dan pengelolaan*. Edisi ke-2. BPFE Yogyakarta: Andi Offset.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh sembilan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Cetakan pertama. Jakarta: Press Group.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik Negara.

Rahayu, Destriani. 2014. Inventarisasi Aset <http://destrianirahayu.blogspot.com/2014/09/inventarisasi-aset.html>

Aufa Rahmatul. 2014. Pengertian Administrasi Menurut Berbagai Ahli <http://a-girl-writes.blogspot.com/2014/09/pengertian-administrasi-menurut.html>

McLeod Raymond. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Indeks

Siregar Doli D. 2004. *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan kesepuluh. Bandung: ALFABETA.

